

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN LELANG DENGAN OBJEK HAK TANGGUNGAN PADA PT. BALAI LELANG TUNJUNGAN KANTOR PERWAKILAN SEMARANG

Debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dijamin dengan hak tanggungan kepada kreditur, berdasarkan Pasal 6 UUHT kreditur berhak melakukan penjualan atas kuasanya sendiri melalui penjualan dimuka umum (lelang) dan mengambil pelunasan dari hasil penjualan tersebut. Dalam hal ini kreditur melakukannya melalui kerjasama dengan PT. Balai Lelang Tunjungan Kantor Perwakilan Semarang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan lelang dengan objek hak tanggungan pada PT. Balai Lelang Tunjungan Kantor Perwakilan Semarang dan untuk mengetahui hambatan dan solusinya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara, dan data sekunder dengan membaca, mengkaji dan menganalisa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dengan teknik analisis kualitatif, ditafsirkan secara logis dan sistematis dan ditarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pelaksanaan Lelang dengan objek hak tanggungan Pada PT. Balai Lelang Tunjungan Kantor Perwakilan Semarang melalui tiga tahap yaitu pra lelang, lelang, dan pasca lelang dan hambatan dalam pelaksanaan lelang yakni kekurangan dokumen lelang, dimana solusinya segera melengkapi dokumen-dokumen, adanya gugatan dari debitur solusinya yaitu melalui persidangan dan pengosongan objek lelang melalui pendekatan persuasif dan fiat eksekusi.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah hukum pelaksanaan lelang dengan objek hak tanggungan pada PT. Balai Lelang Tunjungan Kantor Perwakilan Semarang secara hukum diperbolehkan berdasarkan PMK No.160/PMK.06/2013 tentang Balai Lelang, dimana dalam pelaksanaannya harus dihari oleh pejabat penjual, saksi dan pejabat lelang kelas satu KPKNL.

Kata Kunci: *Perjanjian Kredit, Hak Tanggungan, Lelang, Balai Lelang,*

ABSTRACT

A debtor who defaults on a credit agreement that is pledged as collateral to the creditor, based on Article 6 UUHT the creditor has the right to sell his own proxies through public sale (auction) and take repayment from the proceeds of the sale. In this case the creditor does so through cooperation with PT. Balai Lelang Tunjungan Kantor Perwakilan Semarang

This study aims to determine the implementation of the auction with the object of liability at PT. PT. Balai Lelang Tunjungan Kantor Perwakilan Semarang and to find out the obstacles and solutions.

This study method used is an empirical juridical method using primary and secondary data. Primary data collection techniques are carried out by interviews, and secondary data by reading, reviewing and analyzing primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials with qualitative analysis techniques, interpreted logically and systematically and drawn conclusions.

Based on the results of the study it is known that the Implementation of the Auction with the object of mortgage rights at PT. PT. Balai Lelang Tunjungan Kantor Perwakilan Semarang through three stages, namely pre-auction, auction, and post-auction, and obstacles in the implementation of the auction, namely the lack of auction documents, where the solution is to immediately complete the documents, the claim from the debtor the solution is through trial and emptying the auction object through an approach persuasive and fiat execution.

The conclusion in this thesis is the law of auction implementation with the object of liability at PT. PT. Balai Lelang Tunjungan Kantor Perwakilan Semarang is legally permissible under PMK No.160 / PMK.06 / 2013 concerning the Auction Hall, which in its implementation must be run by a first class KPKNL sales official, witness and auction official.

Keywords: *Credit Agreement, dependent Liability, Auction, Auction Hall*